KOMUNIKASI ORGANISASI KASUS KREDIT MACET KOPERASI SERBA USAHA KEPOLISIAN RESORT GORONTALO

JURNAL

CHANDRA POLINGGAPO
NIM. D02416035

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2020

KOMUNIKASI ORGANISASI KASUS KREDIT MACET KOPERASI SERBA USAHA KEPOLISIAN RESORT GORONTALO

Chandra Polinggapo[1], Nuzlan Botutihe[2], Widya Kurniati Mohi[3]
[123]Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

ABSTRAC

This study aims to study how organizational communication in the case of bad credit cooperatives in all-round Gorontalo Police. Communication has a very vital role in our lives, both in forming social relationships and interpersonal relationships. This research uses descriptive method using qualitative. The results of the study showed that the communication of the Gorontalo Polres Multipurpose Cooperative organization with indicators of understanding was very good. This can be seen from the help of information that is easily understood by all parties so that it is created from the Gorontalo Police Multipurpose Cooperative and members as money in terms of credit management.
Keywords: Communication, organization

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana komunikasi organisasi pada kasus kredit macet koperasi serba usaha Polres Gorontalo. Komunikasi memiliki peranan yang sangat vital dalam kehidupan kita, baik dalam membentuk hubungan sosial maupun hubungan interpersonal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjakkan Komunikasi organisasi Koperasi Serba Usaha Polres Gorontalo dengan indikator pemahaman sudah sangat baik. Hal ini terlihat dari pemberian informasi yang mudah dipahami oleh semua pihak sehingga tercipta kesamaan pandangan antara pihak Koperasi Serba Usaha Polres Gorontalo dan anggota selaku nasabah dalam hal pengelolaan kredit.
Kata Kunci : Komunikasi, organisasi

PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.Hal ini sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan yang menjadi asas koperasi.

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang memiliki tugas mengorganisir juga pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya sesuai kebijakan dan dasar prinsip-prinsip yang berlaku pada suatu koperasi tersebut. Kaidahnya, koperasi pada usaha ekonomi dalam meningkatkan taraf hidup secara khusus pada anggota koperasi dan secara umum pada masyarakat daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa koperasi merupakan suatu gerakan bidang ekonomi rakyat.

Saat ini gerakan koperasi sudah mulai berkembang dengan ditandai adanya gerakan koperasi yang otonom.Namun, pada masa reformasi, gerakan koperasi masih berfokus pada bisnis koperasi yang harus diarahkan ke ciri universalitas kebutuhan yang tinggi. Kebutuhan yang tinggi itu diantaranya; Jasa keuangan, pelayanan infrastruktur, serta pembelian bersama.

Dengan gerakan koperasi yang bersifat otonom ini berpeluang dalam memanfaatkan potensi setempat.Selain itu juga membangkitkan potensi yang benturan sehingga harus segera diselesaikan di tingkat daerah.Sebagai penopang agar koperasi tetap bertahan dan semakin kuat, maka perlu adanya beberapa konsolidasi pada berbagai bidang diantaranya; potensi keuangan, pengembangan jaringan informasi, serta pegembangan pusat inovasi dan teknologi.Ketiga hal demikian merupakan kebutuhan pendukung untuk kuatnya kehadiran koperasi.

Selain itu, dalam gerakan otonom pada koperasi daerah ini

juga terdapat peranan pemerintahan daerah yang dapat mendorong pengembangan lembaga penjamin kredit di daerah.Sedangkan untuk pemusatan koperasi di bidang jasa keuangan sangat tepat untuk dilakukan pada tingkat kabupate/kota. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga arus dana keseimbangan dan keperluan dalam memperhatikan kepentingan daerah (masyarakat setempat). Ada pun fungsi pusat koperasi jasa keuangan ini diantaranya menjaga likuiditas, berperan dalam bidang pengawasan dan perbaikan manajemen.

Bukan hanya di lingkungan masyarakat umum, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai abdi masyarakat merasa sudah sewajarnya membentuk koperasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Koperasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai dengan akhir tahun 1965 baru tersusun sampai dengan tingkat primer, itupun masih belum merata dan belum dibina langsung oleh Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perekonomian Sekitar tahun 1965 mengalami penurunan yang berat, dengan ditandai tingkat inflasi yang tinggi (± 600%), hal ini menyebabkan kemampuan negara di dalam pembinaan kesejahteraan Pegawai Negeri termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia semakin kurang.

Untuk mengatasinya, Komandan Kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibenarkan untuk melakukan *civic mission*, namun hasilnya kurang memenuhi sasaran. Untuk itu disepakati mengusahakan adanya suatu badan usaha yang resmi di lingkungan dinas untuk melakukan usaha dengan berorientasi pada bisnis, maka dibentuklah koperasi.

Pada waktu Komisaris Polisi Tingkat Satu Ating Suganhir menjabat sebagai pejabat Direktur Sajah, gagasan dan tulisan itu disampaikan kembali oleh Komisaris Polisi Tingkat Satu Ating Suganhir kepada Menteri Panglima Angkatan

Kepolisian Jenderal Sucipto Yudodihardjo melalui Deputi Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Brigjen Pol. Drs. R. Soeparno Soeriatmadja.Gagasan tersebut disetujui oleh Menteri Panglima Angkatan Kepolisian dan kepada Komisaris Polisi Tingkat Satu R. Ating Suganhir Satjamihardja diminta untuk menyiapkan instruksi dan surat keputusan yang diperlukan.

Pada tahun 2004 telah dilakukan Penataan Perkoperasian di Lingkungan Polri, dimana semula Perkoperasian di Lingkungan Polri berada dalam Struktur Organisasi Polri, maka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkoperasian di Lingkungan Polri dikeluarkan/dihapus dari Badan Ekstra Struktur Polri dan Kapolri dan Kasatwil Polda, Polres sebagai Penasehat Perkoperasian di Lingkungan Polri dan Pembinanya adalah Pejabat Pengemban Fungsi Pembinaan SDM Polri.

Demikian halnya yang terjadi di lingkungan Polres Limboto.Koperasi serba usaha Kepolisian Resort (Polres) Gorontalo yang berkedudukan di Limboto ini juga melayani simpan pinjam untuk anggotanya.Keanggotaa Koperasi di Lingkungan Polri adalah Pegawai Negeri pada Polri (Anggota Polri dan PNS Polri) Aktif dan para Purnawirawan sesuai ketentuan diatas.

Namun yang menjadi permasalahan utama pada pengurus dan pengelola koperasi serba usaha Polres Gorontalo ini adalah jika ada anggota koperasi yang telah meminjam uang di koperasi dan kemudian anggota tersebut dimutasi di luar Polres Gorontalo, maka secara otomatis seluruh yang menyangkut hak-hak anggota tersebut juga ikut

dimutasi termasuk gaji yang bersangkutan. Olehnya pengurus kesulitan untuk melakukan tagihan utang koperasi tersebut. Telah banyak cara yang dilakukan pengurus termasuk melakukan kompromi atau komunikasi organisasi kepada yang bersangkutan ataupun komunikasi secara personal tetapi hasilnya tidak optimal atau yang diperoleh adalah janji janji yang tidak ditepati dan pada akhirnya mengakibatkan macetnya pembayaran dan tidak optimalnya perputaran uang koperasi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, gejala-gejala lainnya. Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang komunikasi organisasi pada kasus kredit macet koperasi serba usaha Polres Gorontalo, apakan sudah optimal atau belum.

Adapun proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari Teknik Observasi (pengamatan) Teknik wawancara dan Teknik Dokumentasi. Sumber data yang digunakan terdiri sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informandan sumber data sekunder yang diperoleh melalui catatan-catatan pustaka atau infromasi yang diperoleh dari lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana komunikasi organisasi pada kasus kredit macet koperasi serba usaha Polres Gorontalo dengan menggunakan teori Suranto AW (2010;105) tentang indikator

komunikasi organisasi yang efektif diantaranya; pemahaman, kesenangan, mempengaruhi sikap, hubungan yang lebih baik, dan tindakan.

1. Pemahaman

Komunikasi yang efektif haruslah mempertimbangkan hal-hal yang dimiliki oleh khalayak seperti sudut pandang khalayak, latar belakang, pola pikir, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Sebagai komunikator, maka kita harus melakukan usaha untuk memikirkan siapa yang menjadi khalayak sasaran beserta hal-hal yang melekat pada mereka. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan pemahaman yang sama diantara kedua belah pihak yakni komunikator dan komunikate.

Penerimaan pesan oleh komunikan secara cermat (kecermatan dalam persepsi) seperti yang dimaksud oleh komunikator. Artinya pesan itu tersampai sesuai apa yang dimaksudkan oleh komunikator dan tidak diartikan yang berbeda dengan yang dimaksudkan, dalam kegagalan menerima isi cermat disebut kegagalan komunikasi primer (*Primary breakdown in communication*).

Adapun pemahaman yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah; kemampuan organisasi Koperasi Serba Usaha Polres Gorontalo sebagai komunikator dalam menyampaikan pesan kredit macet kepada para nasabah sehingga dapat diterima secara jelas. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis, diketahui bahwa komunikasi organisasi Koperasi Serba Usaha Polres Gorontalo dengan indikator pemahaman sudah sangat baik. Hal ini terlihat dari pemberian informasi yang mudah dipahami oleh semua pihak sehingga tercipta kesamaan pandangan antara pihak Koperasi Serba Usaha Polres Gorontalo dan anggota selaku nasabah dalam hal pengelolaan kredit.

2. Kesenangan

Komunikasi ini disebut komunikasi fatis (*phatic communication*) yaitu dapat

menimbulkan kesenangan. Artinya tidak semua komunikasi ditujukan untuk menyampaikan informasi dan membentuk pengertian. Ketika kita mengucapkan " selamat pagi, apa kabar?" kita tidak bermaksud mencari keterangan, tetapi komunikasi itu dilakukan untuk orang lain merasa apa yang disebut Analisis Transaksional sebagai " saya oke-kamu oke".

Apabila proses komunikasi itu selain berhasil menyampaikan informasi, juga dapat berlangsung dalam suasana yang menyenangkan ke dua belah pihak. Sebenarnya tujuan berkomunikasi tidaklah sekedar transaksi pesan, akan tetapi dimaksudkan pula untuk saling interaksi secara menyenangkan untuk memupuk hubungan insani.

Adapun kesenangan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah komunikasi organisasi yang dilakukan Koperasi Serba Usaha Polres Gorontalo dengan cara menyampaikan pesan secara persuasif dan menciptakan kedamaian diantara kedua belah pihak. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis, diketahui bahwa komunikasi organisasi Koperasi Serba Usaha Polres Gorontalo dengan indikator kesenangan sudah dilakukan. Hal ini terlihat dari proses penanganan kasus kredit macet dengan menggunakan pendekatan persuasif dan kekeluargaan sehingga pihak debitur tetap merasa nyaman dan tidak merasa tertekan. Namun demikian, meskipun pihak Koperasi Serba Usaha Polres Gorontalo sudah menggunakan pendekatan kesenangan dalam penanganan kasus kredit macet, tetapi tetap saja ada anggota atau debitur yang kurang kooperatif sehingga dibutuhkan penanganan yang lebih serius.

3. Tindakan

Dalam dunia kepolisian, tindakan diistilahkan dengan kata represif yaitu suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk.

Dengan kata lain, tindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi, misalnya pelanggaran.

Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan tindakan adalah suatu bentuk aksi dari Koperasi Serba Usaha Polres Gorontalo dalam proses penanganan kasus kredit macet. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis, diketahui bahwa komunikasi organisasi Koperasi Serba Usaha Polres Gorontalo dengan indikator penindakan sudah dilakukan. Hal ini terlihat dari sikap tegas pihak Koperasi Serba Usaha Polres Gorontalo dalam menindak anggota yang lari dari tanggngjawabnya dengan melakukan penyitaan aset anggota bersangkutan yang disesuaikan dengan besaran kerugian pihak Koperasi Serba Usaha Polres Gorontalo.

Komunikasi organisasi dalam bentuk tindakan merupakan langkah yang sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi Koperasi Serba Usaha Polres Gorontalo sebagai sebuah organisasi kepolisian yang bertujuan untuk membentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Tindakan Koperasi Serba Usaha Polres Gorontalo dengan memberikan sanksi tegas kepada setiap anggota yang melakukan pelanggaran seperti kredit macet merupakan langkah konkrit untuk menjaga kondisi kas koperasi agar tetap sehat dan mampu memberikan pelayanan kepada anggota secara luas.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan bahwa;

Komunikasi organisasi Koperasi Serba Usaha Polres Gorontalo dengan indikator pemahaman sudah sangat baik. Hal ini terlihat dari pemberian informasi yang mudah dipahami oleh semua pihak sehingga tercipta kesamaan pandangan antara pihak Koperasi Serba Usaha Polres Gorontalo dan

anggota selaku nasabah dalam hal pengelolaan kredit.

Komunikasi organisasi Koperasi Serba Usaha Polres Gorontalo dengan indikator kesenangan sudah dilakukan. Hal ini terlihat dari proses penanganan kasus kredit macet dengan menggunakan pendekatan persuasif dan kekeluargaan sehingga pihak debitur tetap merasa nyaman dan tidak merasa tertekan.

Komunikasi organisasi Koperasi Serba Usaha Polres Gorontalo dengan indikator penindakan sudah dilakukan. Hal ini terlihat dari sikap tegas pihak Koperasi Serba Usaha Polres Gorontalo dalam menindak anggota yang lari dari tanggngjawabnya dengan melakukan penyitaan aset anggota bersangkutan yang disesuaikan dengan besaran kerugian pihak Koperasi Serba Usaha Polres Gorontalo.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka berikut saran yang penulis tawarkan sebagai bahan pertimbangan;

1. Perlunya meningkatkan komunikasi organisasi antara pihak Koperasi Serba Usaha Polres Gorontalo dengan pihak anggota selaku debitur untuk membangun kesamaan persepsi atau pemahaman dalam rangka mengeleminir terjadinya kasus kredit macet
2. Perlunya menerapkan komunikasi organisasi dengan unsur kesenagan untuk menciptakan rasa damai diantara kedua belah pihak baik dari pihak Koperasi Serba Usaha Polres Gorontalo selaku pengelolah maupun dari pihak anggota selaku debitur yang tidak merasa diteror
3. Perlunya komunikasi organisasi dalam bentuk tindakan yang tegas dari pihak Koperasi Serba Usaha Polres Gorontalo dalam rangka untuk menjaga kondisi keungan koperasi

agar tetap sehat dan untuk menghindari terjadinya kasus kredit macet bagi anggota lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Presiden Nomor 70 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Samson Simatupang. 2000. *Sejarah Koperasi Kepolisian Republik Indonesia.* Pt. Rajawali Putra Jakarta

Sugiyono. 2015*. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta Bandung.

Suranto AW, 2010. *Komunikasi Interpersonal*. Yogyakarta. Graha Ilmu

Surat Kapolri Nomor B/1283/V/2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang Pengawasan Koperasi di Lingkungan Polri

Undang-undang Dasar 1945